



PSKP
Pusat Standar & Kebijakan Pendidikan

BUKU SAKU INDIKATOR PRIORITAS STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2024



A. PENDAHULUAN

UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanahkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Pasal 298 (1) Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal.

Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan bagi peserta didik yang berkualitas, terukur, cepat, dan terjangkau, diperlukan standar teknis pelayanan minimal pendidikan yang sesuai jenjang dan jalur pendidikannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar tersebut maka harus menggunakan data yang akurat, sahih, dan terkini yang akan dijadikan dasar oleh seluruh pemangku kepentingan bidang pendidikan.

Salah satu upaya mewujudkan pendidikan yang berkualitas tersebut, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi meluncurkan Merdeka Belajar episode ke 19: Rapor Pendidikan Indonesia. Rapor Pendidikan Indonesia memuat data profil pendidikan satuan pendidikan dan daerah yang merupakan hasil evaluasi sistem pendidikan di Indonesia. Profil pendidikan adalah laporan komprehensif mengenai layanan pendidikan sebagai hasil dari Evaluasi Sistem Pendidikan yang digunakan sebagai landasan untuk peningkatan mutu layanan pendidikan dan penetapan Rapor Pendidikan.

Profil pendidikan ini diharapkan digunakan sebagai dasar analisis, perencanaan, tindak lanjut, dan monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, Profil pendidikan ini menjadi sumber data untuk perencanaan bidang pendidikan di tingkat satuan pendidikan maupun di tingkat daerah.

Untuk itu, Kemendikbudristek secara terus menerus melakukan berbagai inisiatif yang tujuannya adalah untuk mengoptimalkan platform Rapor Pendidikan agar menjadi satu-satunya sumber data pendidikan yang dapat dipergunakan untuk semua pihak, dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.

Kemendikbudristek dan Kemendagri telah menetapkan delapan (8) indikator prioritas yang ada pada platform Rapor Pendidikan sebagai indikator prioritas Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan pendidikan. Kedelapan indikator ini akan digunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah bidang pendidikan dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal.

Indikator prioritas ini menjadi dasar Pemerintah Daerah dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu disusun Buku Saku Indikator Rapor Pendidikan untuk memudahkan pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimum.



TUJUAN :

Buku Saku Indikator Rapor Pendidikan ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- Menguatkan pemahaman tentang indikator Rapor Pendidikan
- Memudahkan pemerintah daerah melakukan identifikasi refleksi dan benahi dalam rangka menyusun perencanaan daerah
- Menjadi pedoman menyusun perencanaan daerah dengan mengacu pada indikator prioritas Standar Pelayanan Minimal.
- Membantu UPT dalam melakukan pendampingan perencanaan daerah

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762).
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Pelayanan Minimal.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Kodifikasi dan Nomenklatur Daerah.

Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.



C. INDIKATOR PRIORITAS TAHUN 2023 STANDAR PELAYANAN MINIMUM

Kemendikbudristek telah menetapkan indikator prioritas SPM dari indikator Profil Pendidikan Tahun 2023 bagi pemerintah daerah sebagai indikator yang perlu diprioritaskan untuk dibenahi terlebih dahulu.

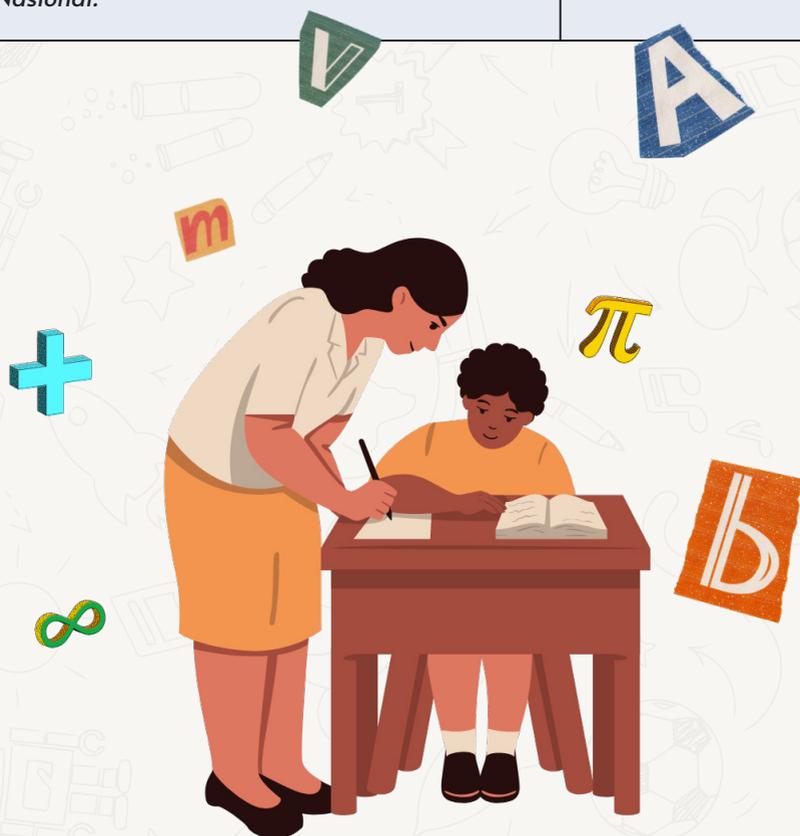
a. Indikator Prioritas Provinsi

INDIKATOR	SUMBER DATA
B.11 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Usia 16 - 18 tahun <i>Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan.</i>	Data Pokok Pendidikan, Kemenag, (BPS/Dukcapil)
	RENTANG NILAI
	0 - 100

INDIKATOR	SUMBER DATA
B.14 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4 - 18 Penyandang Disabilitas <i>Jumlah anak disabilitas usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak disabilitas usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada Kab/ Kota yang bersangkutan.</i>	Survei Sosial Ekonomi Nasional
	RENTANG NILAI
	0 - 100

INDIKATOR	SUMBER DATA
A.1 Kemampuan Literasi Peserta Didik SMA/SMK/SDLB/SIMPLB/SMALB <i>Rata-rata kompetensi Literasi SMA/SMK/SDLB/SIMPLB/SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.</i>	Asesmen Nasional
	RENTANG NILAI 0 - 100

INDIKATOR	SUMBER DATA
A.2 Kemampuan Numerasi Peserta Didik SMA/SMK/SDLB/SIMPLB/SMALB <i>Rata-rata kompetensi Numerasi SMA/SMK/SDLB/SIMPLB/SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.</i>	Asesmen Nasional
	RENTANG NILAI 0 - 100



INDIKATOR	SUMBER DATA
<p>A.4 Tingkat Penyerapan Lulusan SMK</p> <p><i>Survei terhadap lulusan dari SMK yang dilakukan setelah satu tahun mereka lulus baik bekerja, berwirausaha, dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.</i></p> <p><i>Opsi Sakernas: Total jumlah individu lulusan SMK satu tahun sebelumnya yang bekerja atau berwirausaha atau melanjutkan studi dibagi total jumlah individu lulusan SMK satu tahun sebelumnya berdasarkan rapor pendidikan.</i></p>	Asesmen Nasional
	RENTANG NILAI
	0 - 100

INDIKATOR	SUMBER DATA
<p>A.6.2 Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Lulusan SMK</p> <p><i>Kepuasan DUDI terhadap kinerja lulusan SMK berdasarkan persepsi DUDI dengan tentang nilai 1 s.d. 10.</i></p> <p><i>Opsi Sakernas: Jumlah lulusan SMK satu tahun sebelumnya yang mengikuti pelatihan perubahan budaya kerja industri satu tahun sebelumnya dibagi jumlah lulusan SMK satu tahun sebelumnya.</i></p>	Data Tracer Study
	RENTANG NILAI
	0 - 100

INDIKATOR	SUMBER DATA
<p>D.4 Iklim Keamanan Sekolah SMA/SMK/SDLB/SMPLB/SMALB</p> <p><i>Kondisi satuan pendidikan yang kondusif yang memberikan rasa aman (secara fisik dan psikologis), seperti tidak adanya perundungan dan hukuman fisik.</i></p>	Asesmen Nasional
	RENTANG NILAI
	0 - 100

INDIKATOR	SUMBER DATA
D.8 Iklm Kebinekaan Sekolah SMA/SMK/SDLB/SMPLB/SMALB <i>Kondisi sekolah yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala sekolah dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan.</i>	Asesmen Nasional
	RENTANG NILAI 0 - 100

INDIKATOR	SUMBER DATA
D.10 Iklm Inklusivitas Sekolah SMA/SMK/SDLB/SMPLB/SMALB <i>Kondisi yang disediakan oleh sekolah untuk menyediakan layanan bagi siswa dengan disabilitas dan cerdas istimewa dan berbakat istimewa.</i>	Asesmen Nasional
	RENTANG NILAI 0 - 100



b. Indikator Prioritas Kabupaten/Kota

INDIKATOR	SUMBER DATA
<p>B.10 Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD</p> <p><i>Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan.</i></p>	<p>Data Pokok Pendidikan, Kemenag, (BPS/Dukcapil), Survei Sosial Ekonomi Nasional</p>
	RENTANG NILAI
	0 - 100

INDIKATOR	SUMBER DATA
<p>B.5 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A/SDLB</p> <p><i>Jumlah anak usia tujuh (7) sampai dengan dua belas (12) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia tujuh (7) sampai dengan dua belas (12) tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan.</i></p>	<p>Data Pokok Pendidikan, Kemenag, (BPS/Dukcapil)</p>
	RENTANG NILAI
	0 - 100



INDIKATOR	SUMBER DATA
B.8 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B/SMP LB <i>Jumlah anak usia tiga belas (13) sampai lima belas (15) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia tiga belas (13) sampai dengan lima belas (15) tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan.</i>	Data Pokok Pendidikan, Kemenag, (BPS/Dukcapil)
	RENTANG NILAI
	0 - 100

INDIKATOR	SUMBER DATA
B.15 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan <i>Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan pada Kab/Kota yang bersangkutan.</i>	Data Pokok Pendidikan, Kemenag, (BPS/Dukcapil)
	RENTANG NILAI
	0 - 100

INDIKATOR	SUMBER DATA
A.1 Literasi SD/SMP <i>Rata-rata kompetensi Literasi berdasarkan Asesmen Nasional.</i>	Asesmen Nasional
	RENTANG NILAI
	0 - 100

INDIKATOR	SUMBER DATA
A.2 Numerasi SD/SMP <i>Rata-rata kompetensi Numerasi berdasarkan Asesmen Nasional.</i>	Asesmen Nasional
	RENTANG NILAI
	0 - 100

INDIKATOR	SUMBER DATA
B.8 Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B <i>Persentase jumlah satuan PAUD yang terakreditasi minimal B terhadap satuan PAUD yang sudah diakreditasi di Kota/Kabupaten.</i>	Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
	RENTANG NILAI
	0 - 100

INDIKATOR	SUMBER DATA
D.4 Iklim Keamanan Sekolah SD/SMP <i>Kondisi satuan pendidikan yang kondusif yang memberikan rasa aman (secara fisik dan psikologis), seperti tidak adanya perundungan dan hukuman fisik.</i>	Asesmen Nasional
	RENTANG NILAI
	0 - 100

INDIKATOR	SUMBER DATA
D.8 Iklim Kebinekaan Sekolah SD/SMP <i>Kondisi sekolah yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala sekolah dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan.</i>	Asesmen Nasional
	RENTANG NILAI
	0 - 100

INDIKATOR	SUMBER DATA
D.10 Iklim Inklusivitas SD/SMP <i>Kondisi yang disediakan oleh sekolah untuk menyediakan layanan bagi siswa dengan disabilitas dan cerdas istimewa dan berbakat istimewa.</i>	Asesmen Nasional
	RENTANG NILAI
	0 - 100

D. INDIKATOR OTONOMI KHUSUS PAPUA

a. Indikator Prioritas Provinsi di Papua

INDIKATOR	SUMBER DATA
B.14 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4 - 18 Penyandang Disabilitas <i>Jumlah anak disabilitas usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak disabilitas usia 4 (empat) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan.</i>	Survei Sosial Ekonomi Nasional
	RENTANG NILAI
	0 - 100

INDIKATOR	SUMBER DATA
A.1 Literasi SDLB/SMPLB/SMALB <i>Rata-rata kompetensi Literasi SDLB/SMPLB/SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.</i>	Asesmen Nasional
	RENTANG NILAI
	0 - 100

INDIKATOR	SUMBER DATA
A.2 Numerasi SDLB/SMPLB/SMALB <i>Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB/SMPLB/SMALB berdasarkan Asesmen Nasional.</i>	Asesmen Nasional
	RENTANG NILAI
	0 - 100

INDIKATOR	SUMBER DATA
D.4 Iklm Keamanan Sekolah SDLB/SIMPLB/SMALB <i>Kondisi satuan pendidikan yang kondusif yang memberikan rasa aman (secara fisik dan psikologis), seperti tidak adanya perundungan dan hukuman fisik.</i>	Asesmen Nasional
	RENTANG NILAI
	0 - 100

INDIKATOR	SUMBER DATA
D.8 Iklm Kebinekaan Sekolah SDLB/SIMPLB/SMALB <i>Kondisi sekolah yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala sekolah dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan.</i>	Asesmen Nasional
	RENTANG NILAI
	0 - 100

INDIKATOR	SUMBER DATA
D.10 Iklm Inklusivitas Sekolah SDLB/SIMPLB/SMALB <i>Kondisi yang disediakan oleh sekolah untuk menyediakan layanan bagi siswa dengan disabilitas dan cerdas istimewa dan berbakat istimewa.</i>	Asesmen Nasional
	RENTANG NILAI
	0 - 100



b. Indikator Prioritas Kabupaten/Kota di Papua

INDIKATOR	SUMBER DATA
<p>B.11 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/K/MA/MAK/Paket C/SMALB</p> <p><i>Jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun pada provinsi yang bersangkutan</i></p>	<p>Data Pokok Pendidikan, Kemenag, (BPS/Dukcapil)</p>
	RENTANG NILAI
	0 - 100

INDIKATOR	SUMBER DATA
<p>B.10 Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD</p> <p><i>Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan.</i></p>	<p>Data Pokok Pendidikan, Kemenag, (BPS/Dukcapil), Survei Sosial Ekonomi Nasional</p>
	RENTANG NILAI
	0 - 100

INDIKATOR	SUMBER DATA
<p>B.5 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A/SDLB</p> <p><i>Jumlah anak usia tujuh (7) sampai dengan dua belas (12) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia tujuh (7) sampai dengan dua belas (12) tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan.</i></p>	<p>Data Pokok Pendidikan, Kemenag, (BPS/Dukcapil)</p>
	RENTANG NILAI
	0 - 100

INDIKATOR	SUMBER DATA
B.8 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B/SMPPLB	Data Pokok Pendidikan, Kemenag, (BPS/Dukcapil)
<i>Jumlah anak usia tiga belas (13) sampai lima belas (15) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia tiga belas (13) sampai dengan lima belas (15) tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan.</i>	RENTANG NILAI
	0 - 100

INDIKATOR	SUMBER DATA
B.15 Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 18 Kesetaraan	Data Pokok Pendidikan, Kemenag, (BPS/Dukcapil)
<i>Jumlah Warga Negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan pada Kab/Kota yang bersangkutan.</i>	RENTANG NILAI
	0 - 100

INDIKATOR	SUMBER DATA
A.1 Literasi SD/SMP/SMA/SMK	Asesmen Nasional
<i>Rata-rata kompetensi Literasi berdasarkan Asesmen Nasional.</i>	RENTANG NILAI
	0 - 100

INDIKATOR	SUMBER DATA
A.2 Numerasi SD/SMP/SMA/SMK	Asesmen Nasional
<i>Rata-rata kompetensi Numerasi berdasarkan Asesmen Nasional.</i>	RENTANG NILAI
	0 - 100

INDIKATOR	SUMBER DATA
<p>B.8 Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B</p> <p><i>Persentase jumlah satuan PAUD yang terakreditasi minimal B terhadap satuan PAUD yang sudah diakreditasi di Kota/Kabupaten.</i></p>	<p>Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal</p>
	RENTANG NILAI
	0 - 100

INDIKATOR	SUMBER DATA
<p>A.4 Tingkat Penyerapan Lulusan SMK</p> <p><i>Survei terhadap lulusan dari SMK yang dilakukan setelah satu tahun mereka lulus baik bekerja, berwirausaha, dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.</i></p> <p><i>Opsi Sakernas: Total jumlah individu lulusan SMK satu tahun sebelumnya yang bekerja atau berwirausaha atau melanjutkan studi dibagi total jumlah individu lulusan SMK satu tahun sebelumnya berdasarkan rapor pendidikan.</i></p>	<p>Asesmen Nasional</p>
	RENTANG NILAI
	0 - 100

INDIKATOR	SUMBER DATA
<p>A.6.2 Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Lulusan SMK</p> <p><i>Kepuasan DUDI terhadap kinerja lulusan SMK berdasarkan persepsi DUDI dengan tentang nilai 1 s.d. 10.</i></p> <p><i>Opsi Sakernas: Jumlah lulusan SMK satu tahun sebelumnya yang mengikuti pelatihan perubahan budaya kerja industri satu tahun sebelumnya dibagi jumlah lulusan SMK satu tahun sebelumnya.</i></p>	<p>Data Tracer Study</p>
	RENTANG NILAI
	0 - 100

INDIKATOR	SUMBER DATA
D.4 Iklim Keamanan Sekolah SD/SMP/SMA/SMK <i>Kondisi satuan pendidikan yang kondusif yang memberikan rasa aman (secara fisik dan psikologis), seperti tidak adanya perundungan dan hukuman fisik.</i>	Asesmen Nasional
	RENTANG NILAI
	0 - 100

INDIKATOR	SUMBER DATA
D.8 Iklim Kebinekaan Sekolah SD/SMP/SMA/SMK <i>Kondisi sekolah yang menunjukkan adanya sikap dan perilaku kepala sekolah dan guru dalam menerapkan toleransi agama dan budaya serta komitmen kebangsaan.</i>	Asesmen Nasional
	RENTANG NILAI
	0 - 100

INDIKATOR	SUMBER DATA
D.10 Iklim Inklusivitas Sekolah SD/SMP/SMA/SMK <i>Kondisi yang disediakan oleh sekolah untuk menyediakan layanan bagi siswa dengan disabilitas dan cerdas istimewa dan berbakat istimewa.</i>	Asesmen Nasional
	RENTANG NILAI
	0 - 100



LAMPIRAN

